



Padang Panjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



TAHUN 2024





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

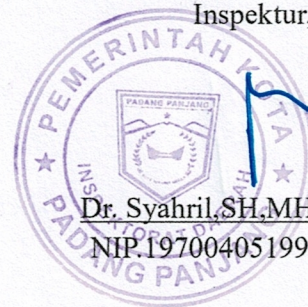
PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, Februari 2025
Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP.197004051997031004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dituntaskan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk media informasi yang berisikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun 2024, sekaligus sebagai pedoman bagi upaya perbaikan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

Padang Panjang, Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



Drs. AMPERA, SH.M.Si

NIP. 19680101 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Penjelasan Umum Organisasi.....	2
C.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C.2. Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.....	9
D. Aspek Strategis dan Isu Strategis.....	11
E. Sistematika Penyusunan LKJiP.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Tujuan dan Sasaran.....	15
B. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2024.....	19
A. Capaian Organisasi	19
A1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas.....	20
A2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data dalam Penyelenggaraan Pemerintahan(Kualitas, Pengelolaan, Pemanfaatan.....	30
B. Realisasi Anggaran.....	41
BAB V Penutup.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan jenis kepegawaian	10
Tabel 1.2	Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Eselon/Jabatan	10
Tabel 1.3	Pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	17
Tabel 2.3	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	18
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 3.1.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 3.1.2	Predikat Indeks SPBE	21
Tabel 3.1.3	Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024	21
Tabel 3.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	23
Tabel 3.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dan target akhir Renstra Sasaran Strategis 1	23
Tabel 3.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dengan standar nasional Sasaran Strategis 1	23
Tabel 3.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dengan Standar Kota Sasaran Strategis 1	24
Tabel 3.1.8	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
Tabel 3.1.9	Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis 1	25
Tabel 3.2.1	Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS	31
Tabel 3.2.2	Predikat Indeks Hasil EPSS	32
Tabel 3.2.3	Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Indeks Domain	33
Tabel 3.2.4	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Sasaran Strategis 2	33
Tabel 3.2.5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	34

Tabel 3.2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dan target akhir Renstra Sasaran Strategis 2	34
Tabel 3.2.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional Sasaran Strategis 2	34
Tabel 3.2.8	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dengan standar kota Sasaran Strategis 2	35
Tabel 3.2.9	Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis 2	35
Tabel 3.2.10	Realisasi Kinerja Program Pendukung	37
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran	41

Dalam rangka mewujudkan tujuan kedua Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel”** maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 mempunyai tujuan untuk mendukung pelaksanaan sasaran kelima RPD yakni **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”** dengan indikator kinerja perolehan indeks SPBE.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskanlah 2 (Dua) sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yakni Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas dengan indikator Indeks domain layanan SPBE dan Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan(kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan dengan indikator Indeks Domain Pembangunan Statistik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2024 ini, merupakan bentuk akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Selain itu juga memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian sasaran strategis melalui 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2024 ini cukup baik, dimana pada satu sasaran strategis I terkait dengan indikator indeks domain layanan SPBE dapat terealisasi melebihi target dengan capaian 112% sedangkan pada sasaran strategis dengan indikator indeks pembangunan statistik belum terealisasi sesuai target dengan capaian hanya sebesar 69,28 %.

Terkait dengan capaian program, dari pelaksanaan 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan selama tahun 2024 rata-rata terealisasi dengan baik. Untuk pencapaian program dari 5 (lima) program hanya 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan

Persandian untuk Pengamanan Informasi yang memiliki capaian cukup terkait dengan hasil penilaian indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang rendah dikarenakan keterbatasan kebijakan/regulasi dan ketersediaan infrastruktur terkait pengamanan informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Padang Panjang. Sementara untuk 4 (empat) program lainnya dapat terealisasi sesuai target.

Tingkat Realisasi anggaran pada tahun 2024 cukup tinggi, dimana dari anggaran perubahan sebesar Rp. 8.824.813.783,- terealisasi sebesar Rp.8.311.789.072,- atau mencapai 94,19%. Adapun sisa lebih perhitungan anggaran berasal dari sisa didominasi adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa belanja pemeliharaan infrastruktur.

Secara umum faktor pendukung untuk pencapaian indikator kinerja utama adalah adanya perbaikan tata kelola, dukungan pimpinan maupun adanya kolaborasi yang baik antara stakeholder terkait. Sementara untuk faktor penghambat berasal dari Penerapan Statistik Sektoral di Kota Padang Panjang, khususnya pada OPD di lingkup pemerintah Kota Padang Panjang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat berapa rekomendasi perbaikan kinerja kedepan diperlukan berupa peningkatan kualitas SDM TIK terkait pengamanan informasi, pengelolaan statistik sektoral, Daftar Informasi Publik serta publikasi website. Selain itu perlu dilakukan penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan terkait pengelolaan SPBE dan Statistik Sektoral.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam sistem akuntabilitas terdapat beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwasanya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban formal bagi setiap Instansi Pemerintah guna mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan menyajikan informasi tentang rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan urusan wajib pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

B. Maksud dan Tujuan :

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, yang berisi informasi mengenai tercapainya sasaran, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah;

1. Sebagai indikator dalam menilai keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi .
2. Sarana evaluasi sekaligus memberikan umpan balik (feed back) dalam rangka penyempurnaan kinerja instansi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan

C. Penjelasan Umum Organisasi

C.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019, dan Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

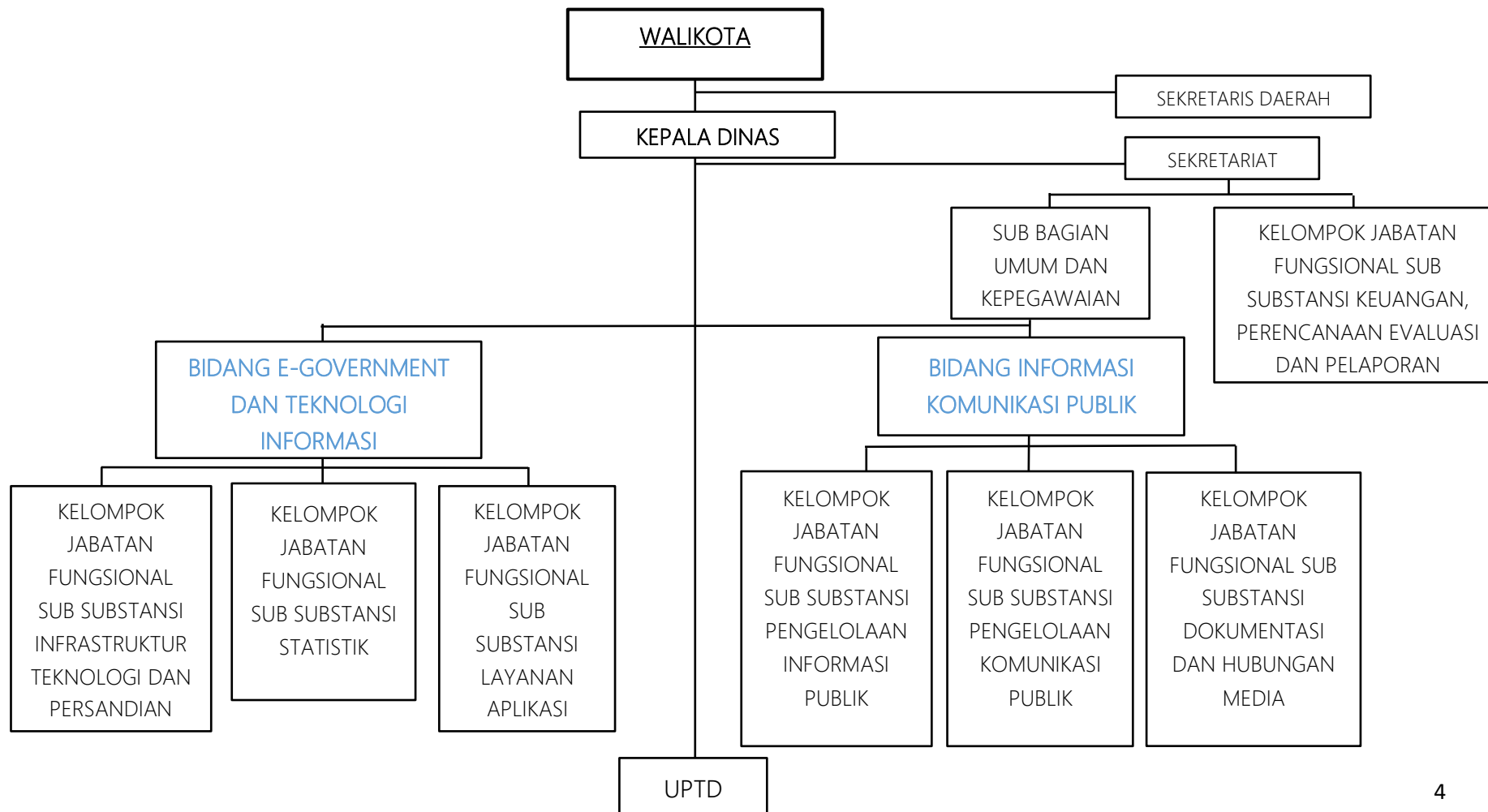
Terkait dengan tugas diatas, Dinas Kominfo Kota Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut ;

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi.
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media;
5. UPTD.

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG



Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat**, dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengandaan, administrasi

perjalanan dinas, ke rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan rumah tangga, sarana prasarana dan aset;
- c) pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Penata usaha keuangan;
- b) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. **Bidang E-Government dan Teknologi Informasi**, yang dikepalai oleh Kepala Bidang E-Government dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang e-Government dan teknologi informasi dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang e-Government dan teknologi informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang E-Government dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi dan Persandian;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Statistik;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Layanan Aplikasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari:

- 1) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan program infrastruktur teknologi dan persandian dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan infrastruktur teknologi dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a) perencanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian;
- b) pelaksanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis infrastruktur teknologi dan persandian; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik yang dikepalai oleh Sub Koordinator Statistik** mempunyai tugas melaksanakan program Statistik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan teknis statistik;
- b) pelaksanaan teknis statistik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis statistik; dan
- d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 3) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi yang dikepalai oleh Sub Koordinator Layanan Aplikasi** mempunyai tugas menyelenggarakan

program Layanan Aplikasi dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Layanan Aplikasi.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan teknis Layanan Aplikasi;
- b) pelaksanaan teknis Layanan Aplikasi;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis Layanan Aplikasi; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Informasi Komunikasi Publik** yang dikepalai oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang informasi komunikasi publik dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang informasi komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai fungsi

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan komunikasi publik;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan dokumentasi dan hubungan media; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Komunikasi Publik, terdiri dari:

- 1) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan informasi publik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis pengelolaan informasi publik;
- b) pelaksanaan teknis pengelolaan informasi publik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis pengelolaan informasi publik; dan
- d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas

menyelenggarakan program pengelolaan komunikasi publik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis pengelolaan komunikasi publik;
- b) pelaksanaan teknis pengelolaan komunikasi publik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan komunikasi publik; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media

yang dikepalai oleh Sub Koordinator Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai tugas menyelenggarakan dokumentasi dan hubungan media dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan media.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis dokumentasi dan hubungan media;
- b) pelaksanaan teknis dokumentasi dan hubungan media;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan dokumentasi dan hubungan media; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

C.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Berdasarkan kondisi tahun 2024, Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berjumlah 63 orang terdiri dari 28 orang ASN dan 35 orang tenaga harian lepas (THL). Adapun gambaran statistik pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan jenis kepegawaian

No.	Uraian	Jenis Kepegawaian		
		ASN	PPPK	THL
1	Golongan IV	4 orang	-	-
2	Golongan III	17 orang	1 orang	
3	Golongan II	3 orang	3 orang	
4	Non Golongan	-	-	35 orang
	Total Pegawai	63 orang		

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari keseluruhan pegawai pada Dinas Kominfo didominasi oleh Pegawai THL sebanyak 52%, dan ASN (PNS dan PPPK) sebesar 48%. Hal ini dikarenakan banyaknya formasi jabatan teknis pada Dinas Kominfo yang belum diisi oleh ASN seperti tenaga jaringan dan tenaga liputan.

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Eselon/Jabatan

No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang
3	Eselon IV.a	1 orang
4	Jabatan Fungsional Keahlian	12 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	11 orang

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024, komposisi pegawai pada Dinas Kominfo didominasi oleh jabatan fungsional baik keahlian sebesar 53% dan jabatan fungsional pelaksana sebesar 47%. Hal ini dikarenakan keberadaan pegawai yang berasal dari penyetaraan eselon IV dan pegawai PPPK yang langsung menempati jabatan fungsional keahlian.

Tabel 1.3
Pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata II	3 orang
2	Strata I	12 orang
3	Diploma III	8 orang
4	SLTA	3 orang

Latar belakang pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan pendidikan didominasi Strata 1 atau Sarjana, selanjutnya adalah pendidikan Diploma III (teknis), Strata II, dan SLTA.

D. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Ada beberapa aspek strategis yang mempengaruhi perencanaan dan pencapaian kinerja OPD, yaitu:

1. Kekuatan (Strengths)

- Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
 - Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang E Government dan Teknologi Informasi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana.
 - Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
- Realisasi anggaran tinggi dan sesuai dengan prinsip *value for money*
 - Realisasi anggaran mencapai 94,19%, menunjukkan efesiensi dalam penggunaan dana. Dinas Kominfo telah menerapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran.
- Indeks domain layanan SPBE terealisasi sebesar 3,82 atau pada predikat Sangat Baik dalam artian secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan

Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik berbasis elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

2. Kelemahan (Weakness)

- Minimnya kuantitas SDM, dan Kualitas SDM terutama yang berkompetensi dan Sertifikasi
 - SDM yang tersedia didominasi oleh THL, sementara ketersediaan PNS masih belum mencukupi kebutuhan sesuai peta jabatan yang tersedia, bahkan terdapat jabatan yang kosong pada fungsional statistisi dikarenakan satu-satunya SDM yang tersedia mengikuti tugas belajar. Selain itu juga jumlah tenaga teknis IT terkait dengan sandiman, programmer, desain grafis dan pengelola jaringan sangat terbatas.
- Alokasi anggaran untuk belanja perencanaan SPBE dan pemeliharaan infrastruktur tidak memadai.
 - Anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan SPBE sering mengalami refocusing sehingga beberapa dokumen perencanaan yang penyusunannya melibatkan pihak ketiga tidak dapat dilaksanakan.
 - Rendahnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur menjadikan penyelenggaraan SPBE tidak berjalan optimal, beberapa perangkat TI seperti videotron, videowall sudah tidak berfungsi maksimal dan seringnya terjadi serangan cyber terhadap keamanan informasi pemerintah kota.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang
 - Dinas Kominfo masih mengalami kekurangan perangkat penunjang seperti mobil operasional penyampaian informasi, dan genset, sehingga berdampak kepada operasional pelaksanaan kegiatan.
- Pelatihan dan pengembangan SDM belum maksimal
 - Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan kompetensi SDM TI, menyebabkan keterbatasan jumlah SDM yang kompeten dan tersertifikasi.

3. Peluang (Opportunities)

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan tingginya komitmen pemerintah pusat dan kota akan percepatan transformasi digital di berbagai sector perlu didukung dengan ketersediaan kebijakan baik dalam hal regulasi maupun perencanaan.

- kondisi geografis kota yang tidak terlalu besar sehingga memudahkan dalam optimalisasi penyelenggaraan SPBE dalam rangka transformasi digital terutama terkait dengan peningkatan layanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik.
- Tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses dan memiliki konten yang menarik.
- Berkembangnya berbagai macam komunitas masyarakat yang memanfaatkan TIK dalam penyebaran informasi.
- penyelenggaraan satu data berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. .Ancaman (Threats)

- Sangat Cepatnya perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi.
 - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat perlu segera di adaptasi dengan penyiapan regulasi dan ketersediaan SDM yang mumpuni.
 - Tingginya serangan cyber attack sehingga perlu meningkatkan keamanan informasi.
- Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota masih kurang memadai
 - Keterbatasan anggaran untuk perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur menjadikan penyelenggaraan SPBE tidak berjalan optimal dan sering terjadinya cyber attack.
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM TI
 - Minimnya kuantitas, dan jumlah ASN yang memiliki kompetensi dapat menghambat peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
 - Tingkat pengetahuan/kapasitas SDM Aparatur dalam pengelolaan teknologi pada pelayanan publik dan pemerintahan masih belum sebanding dengan kemajuan teknologi informasi dalam kerangka e-government yang berkembang begitu pesat.
 - Jumlah Tenaga Teknis IT yang didominasi THL juga menjadi ancaman karena sewaktu-waktu dapat terjadi kekosongan tenaga yang berpengaruh pada kinerja OPD.
- Berkembangnya berbagai komunitas informasi masyarakat, menjadi ancaman untuk terjadinya penyebaran berita/ informasi tidak valid/ hoaks, dan konten negatif.
- Kualitas data statistik sektoral akan berpengaruh sangat signifikan pada ketepatan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Adapun beberapa isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan SPBE, dalam rangka percepatan transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas, dan
2. Peningkatan Data Statistik Sektoral yang berkualitas dalam rangka penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan

E. Sistematika Penyusunan LKjIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sebagai berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Permasalahan utama yang dihadapi oleh OPD
- E. Sistematika Penyusunan LKjIP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 2024

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap proses-proses selanjutnya. Dokumen perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih lanjut dikenal dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan sekaligus dokumen perencanaan kinerja yang berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Terkait hal ini, dalam perencanaan kinerja tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2024-2026.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan OPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan jabaran dari visi dan misi pembangunan, serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mengacu RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 pada tujuan kedua **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel”** dan sasaran kelima **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**. Selanjutnya berdasarkan tujuan dan sasaran RPD tersebut dirumuskanlah Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Definisi Operasional	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Indeks SPBE	nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	3,00	3,10	3,20
		Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	Nilai SPBE yang didapatkan dari tingkat kematangan pengelolaan layanan publik dan layanan administrasi pemerintah daerah (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	2,60	2,80	3,00
		Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan(kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Nilai capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.(berdasarkan hasil evaluasi BPS dengan skala indeks 1-5)	2,80	3,00	3,20

Sumber data: Renstra Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada prioritas program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Perubahan Renstra 2024-2026, lebih lanjut Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai SPBE yang didapatkan dari tingkat kematangan pengelolaan layanan public dan layanan administrasi pemerintah daerah (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	Sesuai dengan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020, Indeks SPBE dihitung menggunakan lembar kerja pengukuran SPBE berdasarkan 47 indikator kinerja yang meliputi 4 domain yaitu kebijakan internal terkait SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.
2	Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Nilai capaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektorial baik di Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. (berdasarkan hasil evaluasi BPS dengan skala 1-5)	$\frac{\text{(jumlah OPD yang mempublikasikan data statistik melalui portal satu data)}}{\text{(total jumlah OPD)}} \times 100\%$

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai bentuk komitmen atas kinerja yang terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Indikator Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja merupakan jabaran dari pencapaian tujuan dan sasaran OPD sebagaimana telah dimuat dalam Rencana Strategis. Penetapan target dalam Perjanjian Kinerja pada dasarnya sesuai dengan Rencana Strategis, namun untuk menjaga kesinambungan dan perbaikan kinerja dari capaian pada tahun sebelumnya dapat dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja.

Lebih lanjut ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja perubahan Dinas Kominfo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Domain Layanan SPBE	2,60	3,40
2	Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan(Kualitas,Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	2,80	2,80
	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,327,672,331	4,529,116,344	
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,650,177,850	1,988,703,200	
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,147,228,600	1,857,736,000	
4	Penyelenggaraan Statistik Sektor	30,020,000	7,068,000	
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	14,160,000	10,960,000	

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang mengalami penyesuaian target sehingga berbeda dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Perubahan target ini dilakukan pada indikator sasaran strategis 1 dimana untuk indeks domain layanan SPBE target mengalami kenaikan dari 2,60 menjadi 3,40 dikarenakan capaian indikator ini pada tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 3,26. Sementara untuk indikator sasaran strategis Indeks Domain Pembangunan Statistik penetapan target sesuai dengan Renstra. Penyesuaian target kinerja ini dimaksudkan guna kesinambungan dan perbaikan kinerja selanjutnya. Sementara itu untuk Pagu Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja menggunakan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2024, berbeda dengan anggaran yang digunakan untuk mengukur realisasi keuangan bersumber dari LRA yang menggunakan anggaran pada Dokumen Pergeseran Perubahan Anggaran 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapai kinerja yang diharapkan.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama untuk

mendukung capaian 2 (dua) Sasaran Strategis OPD. Pencapaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Strategis akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

A.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas.

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis 1, Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks	Domain Layanan SPBE	3,40	3,82	112%

Sumber : Kemenpan RB (Hasil evaluasi SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Tabel 3.1.2
Predikat Indeks SPBE

Predikat Indeks SPBE		
No	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Sumber : Kemenpan RB (Hasil evaluasi SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE dikelompokkan atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Dari rangkaian penilaian evaluasi SPBE Kota Padang Panjang yang dilakukan mulai Bulan Juli tahun 2024 melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interview didapat hasil penilaian sebagaimana pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 3.1.3
Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024

Nama Indeks	Bobot	Nilai 2024
SPBE		3,16
Domain Kebijakan SPBE	13%	3,60
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	13%	3,60
Domain Tata Kelola SPBE	25%	2,90
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	25%	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	10%	3,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	5%	3,00

Domain Manajemen SPBE	16,5%	2,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	12%	1,13
<i>Audit TIK</i>	4,5%	2,00
Domain Layanan SPBE	45,5%	3,82
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	27,5%	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	18%	4,00

Sumber data : Kemenpan RB (Hasil evaluasi SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Indeks domain layanan SPBE merupakan salah satu dari 4 domain SPBE dengan bobot penilaian terbesar yakni 45,5 %. Pada Domain layanan SPBE terdiri dari penilaian terhadap penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Secara umum dari target kinerja sebesar 3,40 berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB untuk tahun 2024 hasil penilaian Kota Padang Panjang terealisasi **sebesar 3,82** pada predikat **Sangat Baik** atau dengan capaian kinerja 112%.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Aplikasi seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi telah digunakan secara optimal, dengan kolaborasi antar-layanan elektronik yang mendukung integrasi dan efisiensi. Aplikasi TPP juga menunjukkan fungsi transaksi, validasi, kemajuan status persetujuan data, dan analitik data yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAK, mencerminkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan layanan administrasi.

Tabel 3.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	na	2,81	na	3,55	3,26	92	3,40	3,82	112

Sumber : Kemenpan RB (Hasil evaluasi SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja untuk indikator indeks domain layanan SPBE, dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan nilai realisasi sebesar 117%.

Tabel 3.1.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	3,82	3,00	127

Sumber : Kemenpan RB (Hasil evaluasi SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Target kinerja tahun 2024 ini ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan target Renstra, hal ini dikarenakan capaian kinerja untuk indikator ini pada tahun sebelumnya yang lebih dari target yang ditetapkan. Untuk nilai indeks SPBE pada akhir Renstra pada tahun 2024-2026 ditetapkan sebesar 3.00 sementara hasil penilaian tahun 2024 sebesar 3,82 artinya capaian kinerja sebesar 127%, dengan kata lain **telah melebihi target**.

Tabel 3.1.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-rata Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	3,82	3,78	101

Sumber : Kemenpan RB (Hasil evaluasi Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Perbandingan capaian nilai indeks domain layanan SPBE Kota Padang Panjang dengan standar rata-rata nasional dalam hal ini sebesar 3,78 dapat disimpulkan bahwa indeks domain layanan SPBE kota Padang Panjang sudah berada diatas rata rata nasional.

Tabel 3.1.7

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dengan Standar Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-rata Kota	% Capaian
1.	Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	3,82	4.05	94

Sumber : Kemenpan RB (Hasil evaluasi Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Sementara perbandingan capaian nilai indeks domain layanan SPBE Kota Padang Panjang dengan standar nilai yang didapat kota lain, dalam hal ini menggunakan rata rata realisasi nilai kota pada tahun 2024 sebesar 4.05 artinya perolehan nilai indeks domain layanan SPBE Kota Padang Panjang masih berada dibawah nilai rata-rata kota yang ada di Indonesia.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas, didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) Program yakni:

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dan
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Tabel 3.1.8

Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis 1

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	3.4	3.82	112%	3,822,710,200	3,793,238,439	97,02%
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3.6	2.9	81%	1,846,011,000	1,826,694,501	99%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	2	2	100%	1,846,011,000	1,826,694,50 1	99%
	indeks aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	3.70	3.70	100%			
	indeks aspek layanan publik berbasis elektronik	3.7	4	108%			
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan E- Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksana an dan pengawasan E- Government dalam penyelenggara an pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	1	1	100%	110,641,000	110,129,041	99%
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2	2	100%			
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	7	7	100%	1,735,370,000	1,716,565,46 0	99%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	1	100%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai indeks KAMI	375	222	59%	10,960,000	9,825,250	90%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan	1	1	100%	10,960,000	9,825,250	90%
	Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi	52	33	63%			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	100%	10,960,000	9,825,250	90%
	Jumlah Pelatihan Persandian yang dilaksanakan	1	1	100%			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	44%	100%	227%	1,965,739,200	1,956,718,688	99.54%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Follower pada laman resmi kominfo padang panjang	27000	43237	160%	1,965,739,200	1,956,718,688	99.54%
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	1	100%	306,107,000	305,444,806	92,61%
	Jumlah rilis berita mengenai informasi pembangunan daerah	1000	1150	115%			
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	1	100%	159,129,000	156,261,382	86,67%
	Jumlah Konten Informasi Publik	850	681	80%			
	Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	0	0				
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5	5	100%	1,491,017,200	1,485,526,500	72,55%
	Jumlah pertemuan jumpa pers	6	6	100%			
	Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	1	1	100%			

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi kan Informasi Program atau Kebijakan	1	2	200%	9,486,000	9,486,000	0.00%
		Jumlah Web KIM	2	2	100%		
		Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1	1	100%		

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika, dengan total pagu anggaran sebesar Rp1.846.011.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.826.694.501,- atau sebesar 95,54%. Indikator kinerja dari program ini adalah berupa indeks domain tata Kelola SPBE sebesar 3,60 dan terealisasi sebesar 2,90 atau dengan capaian kinerja 80,56 %.
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.653.626.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.457.460.534,- atau sebesar 92,61%. Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah:Jumlah aplikasi/ proses bisnis yang dikembangkan sebanyak 2 (dua) aplikasi dan terealisasi 2 (dua aplikasi) atau capaian kinerja 100%, Indeks Aspek Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target nilai 3,70 dapat terealisasi sesuai target sebesar 3,70 atau dengan capaian kinerja 100% dan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan target nilai 3,70 dapat terealisasi melebihi target sebesar 4.00 atau dengan capaian kinerja 108%.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.398.239.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.956.718.688 atau sebesar 81,59%. Indikator kinerja program ini adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran

penyebaran informasi publik dengan target sebesar 44% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian 227%.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.398.239.200,- dan terealisasi sebesar Rp.1.956.718.688 atau sebesar 81,59%. Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah follower pada laman resmi Kominfo Padang Panjang (Instagram) sebanyak 27.000 followers dan terealisasi sebanyak 43.237 followers atau dengan capaian 160%.

3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 10.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.825.250,- atau sebesar 89.65%. Adapun indikator kinerja untuk program ini adalah indeks KAMI dengan nilai sebesar 375 dan dapat terealisasi sebesar 222 Atau dengan capaian kinerja 59,2 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 10.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.825.250,- atau sebesar 89.65%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan atau capaian 100%, Nilai aspek Tata Kelola Keamanan Informasi dengan nilai 52 dan teralisasi sebesar 33 atau dengan capaian kinerja 59%.

Secara umum rata-rata capaian untuk masing-masing program cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yang belum teralisasi sesuai target terkait dengan indeks tata Kelola SPBE dan indeks kemananan informasi yang capaiannya masih dibawah target.

Dari gambaran, perbandingan dan analisa atas capaian kinerja indikator sasaran strategis, maka dapat disimpulkan bahwa terkait peningkatan capaian indeks domain layanan SPBE Kota Padang Panjang terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain sebagai berikut :

1. Sudah adanya Kebijakan Internal tata Kelola SPBE, antara lain Kebijakan Internal Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan.
2. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Aplikasi seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi telah digunakan secara optimal, dengan kolaborasi antar-layanan elektronik yang mendukung integrasi dan efisiensi. yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang Panjang

3. Menguatnya koordinasi dan kolaborasi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengkomunikasikan /mengkoordinasikan tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja.

Sementara itu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi, diantaranya :

1. Perlunya komitmen, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan SPBE sebagai program strategis Nasional dan Daerah antara pimpinan dan stakeholder terkait.
2. Perlunya penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan strategis terkait tata kelola SPBE khususnya penyusunan dokumen masterplan Smart City dan Arsitektur SPBE.
3. Perlunya penyusunan regulasi/kebijakan terkait tatakelola pengamanan informasi pemerintah daerah.
4. Perlu penambahan/pengadaan personil, dan peningkatan kapasitas SDM TI dan persandian.
5. Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk kebutuhan penyediaan infrastruktur TI dan pengamanan informasi.

A.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;

- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.2.1

Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk		
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi		
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas		Keterbandingan & Konsistensi		
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas			SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik				
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kota Padang Panjang adalah:

- Kompilasi Produk Administrasi Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Panjang Tahun 2023,
- Survey Evaluasi Implementasi Smart City Kota Padang Panjang Tahun 2023

Dari penilaian tersebut didapatkan hasil Indeks Pembangunan Statistik Kota Padang Panjang sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.3
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	1,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,87
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,17
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,18
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,45
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	1,94

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Tabel 3.2.4
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	2.80	1.94	69,28%

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Berdasarkan hasil EPSS Dari penilaian tersebut didapatkan hasil Indeks Pembangunan Statistik Kota Padang Panjang sebesar 1,94 atau masuk kategori **cukup**. Dibandingkan target pada tahun 2024, capaian untuk sasaran strategis ini sebesar 69,28% atau **belum mencapai target** Perjanjian Kinerja.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.5
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	na	2,61	na	2,80	1,94	69,28

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator indeks pembangunan statistik lebih rendah dari perolehan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dan target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	% Capaian
2.	Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	1,94	3,20	60,62

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2026, maka realisasi kinerja untuk indikator ini baru mencapai 60,62% dari target akhir Renstra.

Tabel 3.2.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	1,94	2,35	82,55%

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Statistik dibanding dengan standar rata-rata Nasional sebesar 2,35 diperoleh capaian sebesar 82,55% atau dibawah standar nasional.

Tabel 3.2.8
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dengan Standar Kota

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-rata Kota	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks domain Pembangunan Statistik	1,94	2,51	77,29%

Sumber : Kemenpan RB (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Untuk perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan standar rata-rata nilai perolehan Kota yang ada di Indonesia adalah sebesar 2,35 diperoleh capaian sebesar 77,29% atau dibawah standar nilai rata-rata Kota. Capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan), didukung oleh pelaksanaan . Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Tabel 3.2.9
Realisasi Kinerja Program Pendukung

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	TARGET	REALISASI	CAPAIA N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	2.8	1.94	69%	7,068,000	6,088,750	80 0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	35%	71%	203%	7,068,000	6,088,750	80%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3	3	100%	7,068,000	6,088,750	80%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase metadata statistik sektoral yang berkualitas	35%	35%	100%	7,068,000	6,088,750	80%
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	1	100%			
	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan	3	3	100%			

Secara umum realisasi kinerja program pendukung untuk sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 7.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.088.750,- atau sebesar 80,03%. Indikator kinerja program ini adalah persentase data statistik sektoral yang berkualitas sebesar 35% dan terealisasi sebesar 71% atau dengan capaian kinerja 202%.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.7.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.088.750,- atau sebesar 80,03%. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) dokumen atau dengan capaian kinerja 100% dan Persentase metadata statistic sektoral yang berkualitas sebanyak 35% dan terealisasi sebanyak 35%. atau dengan capaian kinerja 100%.

Dari gambaran, perbandingan dan analisa atas capaian kinerja indikator sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan), maka dapat disimpulkan bahwa terkait pencapaian indeks

pembangunan statistik yang belum sesuai dengan target dapat diidentifikasi beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Penerapan statistik sektoral di Kota Padang Panjang, khususnya pada OPD di lingkup pemerintah Kota Padang Panjang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan statistik sektoral.

Sebagai rekomendasi agar capaian kinerja sasaran strategis ini dapat terlaksana sesuai dengan target ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

1. Perlu disusun pedoman penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Kota Padang Panjang yang mengatur tentang kaidah dari semua aspek penyelenggaraan statistik sektoral.
2. Perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang lebih intens terhadap penyelenggaraan statistik sektoral melalui Forum Satu Data Kota Padang Panjang
3. Perlu adanya SDM yang memadai dan kapabel dibidang statistik.

B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1.1. Komposisi dan Kualifikasi SDM

- Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 28 ASN, 7 pegawai harian, dan 1 pegawai honorer. Dari keseluruhan pegawai pada Dinas Kominfo didominasi oleh Pegawai THL sebanyak 52%, dan ASN (PNS dan PPPK) sebesar 48%. Hal ini dikarenakan banyaknya formasi jabatan teknis pada Dinas Kominfo yang belum diisi oleh ASN seperti tenaga jaringan dan tenaga liputan
- Sebaran Golongan: Mayoritas pegawai berada di Golongan III (68%), yang mencerminkan belum memadainya jumlah tenaga teknis.
- Tingkat Pendidikan ASN:
 - 43% pegawai memiliki gelar Sarjana (S1), 10% memiliki S2 selebihnya 47% memiliki gelar D3 dan SMA
- Sertifikasi Kompetensi:
 - Hanya 1 pegawai yang memiliki sertifikasi profesional seperti Sandiman.
 - Dibandingkan jumlah ASN sebanyak 28 orang, proporsi pegawai bersertifikasi sangat rendah.

1.2. Efisiensi dan Permasalahan SDM

Keunggulan:

- Struktur organisasi cukup lengkap dengan pembagian tugas yang jelas dan spesialisasi dalam bidang pengawasan.
- Kualifikasi pendidikan cukup baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.

Kelemahan:

- Ketidakseimbangan antara jumlah ASN dan THL, dengan hanya 28 ASN dan 35 THL.
- Keterbatasan jumlah formasi teknis yang diisi oleh ASN akan berdampak pada kesinambungan dan kualitas kinerja organisasi.
- Masih adanya formasi peta jabatan yang kosong yang berimbas pada capaian kinerja organisasi.
- Minimnya program pelatihan dan peningkatan kompetensi berdampak pada minimnya SDM yang berkompetensi.

1.3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi SDM

Strategi Perbaikan:

- Meningkatkan jumlah pegawai bersertifikasi, terutama dalam bidang programmer, design grafis, sandiman, statistisi dan pengelolaan keuangan daerah.
- Mendorong pelatihan berkelanjutan melalui program Bimtek, workshop, dan studi lanjut ke jenjang S2.
- Mengusulkan penambahan formasi pegawai melalui BKPSDM untuk mengisi kekosongan formasi dan mengoptimalkan redistribusi tugas agar pembagian beban kerja lebih merata.

2. Efisiensi Sumber Daya Keuangan

2.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

- Total Anggaran: Rp 5,6 miliar, dengan 98,63% telah terealisasi.
- Distribusi Anggaran:
 - Rp 4.562.535.583 (51,70%) untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Rp 2.397.239.200 (27%) untuk Program Informasi dan Komunikasi Publik.
 - Rp 1.826.694.501 (21%) untuk Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika.
 - Rp 7.068.000 (1%) untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Rp 10.960.000 (1%) untuk Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.2. Efisiensi dan Permasalahan Anggaran

Keunggulan:

- Realisasi anggaran mencapai 94.19%, menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan penggunaan dana.

Kelemahan:

- Tidak tersedianya anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan SPBE dikarenakan refocusing anggaran.
- Tidak tersedianya anggaran yang mencukupi untuk belanja barang/jasa dan belanja pemeliharaan TI sehingga sering terjadinya serangan syber dan beberapa sarana TI tidak berfungsi maksimal.
- Minimnya anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM, yang berdampak pada stagnasi peningkatan kapabilitas SDM TI.

2.3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran

Strategi Perbaikan:

- Mendorong komitmen anggaran untuk pencapaian kinerja program prioritas nasional dan daerah dalam hal ini penganggaran yang terkait SPBE.
- Optimalisasi efisiensi belanja operasional, misalnya dengan digitalisasi beberapa proses administrasi untuk mengurangi biaya kertas dan cetakan.
- Mendorong SDM untuk mengikuti pelatihan secara digital (online) yang disediakan secara gratis oleh Kementerian Kominfo.

3. Efisiensi Sarana dan Prasarana

3.1. Kondisi Sarana dan Prasarana

- Beberapa fasilitas pendukung belum optimal, terutama perangkat listrik dan elektronik seperti genset, laptop, printer, dan peralatan kerja lainnya.
- Belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan mebel, yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam perencanaan kebutuhan fasilitas kerja.

3.2. Efisiensi dan Permasalahan Sarana Prasarana

Keunggulan:

- Kebutuhan dasar operasional masih terpenuhi, meskipun ada beberapa keterbatasan.

Kelemahan:

- Minimnya peralatan kerja menyebabkan penurunan efisiensi operasional.

- Kurangnya dukungan fasilitas pendukung, seperti sistem digitalisasi untuk mendukung pemeriksaan berbasis teknologi.

3.3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Sarana dan Prasarana

Strategi Perbaikan:

- Mengusulkan pengadaan peralatan kantor berbasis teknologi untuk mendukung kinerja.
- Mengalokasikan dana pemeliharaan untuk perbaikan dan penggantian peralatan kerja yang sudah usang.

Kesimpulan dan Rekomendasi Utama

Aspek	Keunggulan	Permasalahan	Rekomendasi
SDM	Mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.	Minimnya SDM bersertifikasi, pelatihan belum maksimal	Peningkatan pelatihan dan sertifikasi, redistribusi tugas
Anggaran	Realisasi 94.19%, sesuai prinsip value for money	Anggaran belanja barang/jasa dan pemeliharaan infrastruktur tidak mencukupi sehingga mengganggu penyelenggaraan SPBE	Komitmen Anggaran untuk program prioritas nasional/daerah seperti penyelenggaraan SPBE
Sarana & Prasarana	Pemeliharaan kendaraan cukup baik	Kekurangan perangkat listrik dan kurangnya anggaran pemeliharaan mebel	Pengadaan peralatan dan alokasi dana pemeliharaan

Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah mencapai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar kinerja dapat lebih optimal.

Langkah strategis yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan jumlah SDM berkompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi lanjutan.
2. Memastikan adanya komitmen anggaran untuk pelaksanaan program strategis dan prioritas nasional semisal SPBE.
3. Melaksanakan digitalisasi pengawasan dengan pengadaan sistem e-audit untuk meningkatkan efisiensi operasional.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian anggaran kinerja keuangan pada tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan data hasil pengukuran kinerja keuangan. Realisasi anggaran Dinas Kominfo pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SESUAI PK PERUBAHAN	ANGGARAN SESUAI LRA	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.808.055.544	8,956,870,789	8,649,692,500	94,19%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.529.116.344	4,562,535,583	4,405,984,883	97%
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.584.928.344	3,703,106,583	3,568,305,179	96%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.584.928.344	3,703,106,583	3,568,305,179	96%
B	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000	14,000,000	14,000,000	100%
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.000.000	14,000,000	14,000,000	100%
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.038.000	289,038,300	287,591,257	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	8.136.500	8,136,500	7,766,000	95%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.999.700	33,999,700	33,164,500	98%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.001.800	4,001,800	3,940,200	98%
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.900.000	242,900,000	242,720,557	100%
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.365.000	42,365,000	34,250,000	81%
1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.365.000	42,365,000	34,250,000	81%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.843.000	307,092,000	296,189,260	96%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.365.000	107,132,000	99,597,987	93%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.960.000	199,960,000	196,602,260	98%
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.942.000	206,934,000	205,638,200	99%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174.774.000	166,056,000	165,850,200	100%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.908.000	26,908,000	26,658,000	99%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.260.000	13,970,000	3,130,000	94%
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.421.203.200	2,398,239,200	2,063,195,688	82%
G	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.421.203.200	2,398,239,200	2,063,195,688	82%
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	306.107.000	306,107,000	305,444,806	100%
2	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	165.329.000	159,129,000	156,261,382	98%
3	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1.506.017.200	1,491,017,200	1,485,526,500	100%
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	11.250.000	9,486,000	9,486,000	100%
5	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	432.500.000	432,500,000	106,477,000	25%
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.857.736.000	1,846,011,000	1,826,694,501	99%
H	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.857.736.000	1,846,011,000	1,826,694,501	99%
1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	118.866.000	110,641,000	110,129,041	100%

2	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.738.870.000	1,735,370,000	1,716,565,460	99%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN STATISTIK	7,068,000	7,068,000	6,088,750	80%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	7,068,000	7,068,000	6,088,750	80%
I	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	7,068,000	7,068,000	6,088,750	80%
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	7,068,000	7,068,000	6,088,750	80%
	URUSAN PERSANDIAN	10,960,000	10,960,000	9,825,250	90%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	10,960,000	10,960,000	9,825,250	90%
J	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,960,000	10,960,000	9,825,250	90%
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10,960,000	10,960,000	9,825,250	90%
		8.826.083.544	Rp. 8.824.813.783	Rp.8.311.789.072	94,19%

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan belanja dengan total anggaran sebesar Rp. 8.824.813.783 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) setelah pergeseran Total Anggaran ini berbeda dengan Anggaran yang terdapat pada Perubahan Perjanjian Kinerja yang berpedoman pada Perubahan Anggaran sebelum terjadinya pergeseran. Dari total anggaran ini dapat direalisasikan sebesar Rp.8.311.789.0728 atau mencapai 94,19%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKJIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisa, diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis melalui 2 (Dua) indikator kinerja utama pada tahun 2024 belum seluruhnya sesuai target, dimana pada satu sasaran terkait dengan indikator indeks domain layanan SPBE dapat terealisasi melebihi target dengan capaian 112% sedangkan pada sasaran strategis dengan indikator indeks pembangunan statistic belum terealisasi sesuai target dengan capaian hanya sebesar 69,28 %
2. Terkait dengan capaian program, dari pelaksanaan 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan selama tahun 2024 rata-rata terealisasi dengan baik. Untuk pencapaian program dari 5 (lima) program hanya 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang memiliki capaian cukup terkait dengan hasil penilaian indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang rendah dikarenakan keterbatasan kebijakan/regulasi dan ketersediaan infrastruktur terkait pengamanan informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Padang Panjang. Sementara untuk 4 (empat) program lainnya dapat terealisasi sesuai target.
3. Tingkat Realisasi anggaran pada tahun 2024 cukup tinggi, dimana dari anggaran perubahan sebesar Rp. 8.824.813.783,- terealisasi sebesar Rp.8.311.789.072,- atau mencapai 94,19%. Adapun sisa lebih perhitungan anggaran berasal dari sisa didominasi adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa belanja pemeliharaan infrastruktur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, masih terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti guna perbaikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang di tahun selanjutnya, diantaranya:

1. Perlunya komitmen, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan SPBE sebagai program strategis Nasional dan Daerah antara pimpinan dan stakeholder terkait.
2. Perlunya penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan strategis terkait tata kelola SPBE khususnya penyusunan dokumen masterplan Smart City dan Arsitektur SPBE.
3. Perlunya penyusunan regulasi/kebijakan terkait tatakelola pengamanan informasi pemerintah daerah.
4. Perlu penambahan/pengadaan personil, dan peningkatan kapasitas SDM TI dan persandian.
5. Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk kebutuhan penyediaan infrastruktur TI dan pengamanan informasi.
6. Perlu disusun pedoman penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Kota Padang Panjang yang mengatur tentang kaidah dari semua aspek penyelenggaraan statistic sektoral.
7. Perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang lebih inten terhadap penyelenggaraan statistik sectoral melalui Forum Satu Data Kota Padang Panjang
8. Perlu tersedianya SDM yang memadai dan kapabel dibidang statistik

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan dari gambaran pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama tahun 2024, beberapa hal direkomendasikan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang mendatang.

Padang Panjang, Desember 2024

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**

The image shows a circular official stamp of the Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**Drs. AMPERA, SH.M.Si
NIP. 196810703 198203 1 00**

LAMPIRAN :



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. M. Yamin SH Nomor 2 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114

Email : kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 050/04 /DISKOMINFO-PP/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

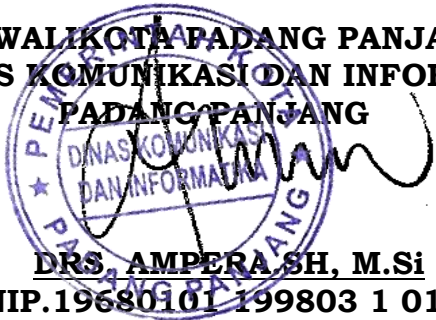
Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/04 /DISKOMINFO-PP/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

- 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
- 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
- 10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang Panjang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
PADANG PANJANG

DRS. AMPERA SH, M.Si
NIP.19680101 199803 1 01

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/04/DISKOMINFO-PP/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas
Komunikasi Informatika Tahun 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks domain layanan SPBE)	skala 1-5	Belum optimalnya penyelenggara an Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai capaian penyelenggaraan SPBE terkait dengan penerapan layanan SPBE baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik.	Hasil evaluasi Kemenpan RB sesuai instrumen dalam PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.	Komunikasi dan Informatika	KemenpanRB	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Skala 1-5	Belum optimalnya penyelenggaraan statistic sectoral	Nilai capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral baik di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. (berdasarkan hasil evaluasi BPS)	IPS dihitung dengan rata-rata dari hasil penilaian penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah menggunakan instrument penilaian dari BPS sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik	BPS	

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG
DRS. AMPERA SH, M.S
NIP.19630101 199803 1 010



PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	2,60	0				-	0%	Penilaian untuk tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada bulan Juli	mempersiapkan bahan terkait
2	Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	indeks domain pembangunan statistik	2,80	0				-	0%	Penilaian untuk tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada triwulan II	mempersiapkan bahan terkait

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan I		Ket
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,327,672,331	1,267,327,338	29.92%	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,437,988,481	998,709,935	29.05%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3,437,988,481	998,709,935	29.05%	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14,000,000	-	0.00%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14,000,000	-	0.00%	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	298,534,550	70,909,643	23.75%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	8,136,500	1,016,000	12.49%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,998,100	6,894,500	19.70%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,999,950	588,400	5.88%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245,400,000	62,410,743	25.43%	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,233,300	19,500,000	56.96%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34,233,300	19,500,000	56.96%	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313,514,000	67,695,760	21.59%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109,530,000	25,772,050	23.53%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203,984,000	41,923,710	20.55%	

6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229,402,000	110,512,000	48.17%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177,164,000	107,262,000	60.54%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,908,000	-	0.00%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,330,000	3,250,000	12.83%	
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,650,177,850	395,623,548		
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,650,177,850	395,623,548	23.97%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	331,805,000	110,180,426	33.21%	
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	182,232,600	30,395,772	16.68%	
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1,110,971,000	255,047,350	22.96%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	25,169,250	-	0.00%	
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,147,228,600	333,319,756	15.52%	
8	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,147,228,600	333,319,756	15.52%	
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270,573,600	24,323,026	8.99%	
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	1,876,655,000	308,996,730	16.47%	
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	30,020,000	1,039,500	3.46%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30,020,000	1,039,500	3.46%	
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	30,020,000	1,039,500	3.46%	
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	14,160,000	1,669,500	11.79%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14,160,000	1,669,500	11.79%	
10	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	14,160,000	1,669,500	11.79%	

Padang Panjang, 5 April 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang


Drs. AMPERA SH, M.Si
NIP. 196801311998031010

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Jum'at, 4 Oktober 2024

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Pimpinan Rapat : Kadis Kominfo Kota Padang Panjang

Peserta : ASN di lingkungan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo Bulan September

dan Triwulan III Tahun 2024.

Isi Rapat : 1. Rapat membahas tentang evaluasi kinerja Dinas Kominfo pada Bulan September sekaligus Triwulan III Tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024.

2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada akhir September, untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dari target sebesar 84% baru terealisasi sebesar 81% atau dengan persentase capaian kinerja fisik sebesar 96%. Sementara itu terkait dengan realisasi keuangan, dari target sebesar 79% dapat terealisasi sebesar 71 % atau dengan capaian kinerja sebesar 90 %.

3. Terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada sasaran strategis Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas dengan Indikator Indeks domain layanan SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan target sebesar 2,60 masih belum bisa diukur dikarenakan hasil evaluasi akan didapatkan pada akhir tahun 2024. Pada Triwulan III kegiatan yang dilakukan lebih kepada perencanaan kegiatan, koordinasi TIM SPBE serta upload bukti dukung kelengkapan penilaian.

b. Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan) dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan target indeks 2,80, penilaian sudah dilakukan pada bulan Mei dan hasil evaluasi dijadwalkan akan diperoleh akhir tahun 2024..

c. untuk Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan informasi publik dengan indikator Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan dengan target 67% sudah terealisasi 67 % atau capaian kinerja 100%. Dari 6 indikator yang ditargetkan 4 diantaranya sudah tersedia data dukungnya antara lain Ketersediaan SDM Pengelola (dibuktikan melalui SK Tim Pengelola), Laporan Tindak lanjut penyelesaian pengaduan, Laporan responsivitas penyelesaian pengaduan (Kecepatan tindak lanjut) dan Rating penilaian masyarakat. Sementara untuk indikator kualitas dan rencana aksi sudah disusun dengan SK kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang.

4. Realisasi program penunjang urusan pemerintah daerah yang diampu Sekretariat pada triwulan II hampir sesuai dengan target. Sub kegiatan yang tidak mencapai target terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana kantor dikarenakan realisasi pengadaan filling cabinet baru bisa dilakukan dipertengahan anggaran setelah dilakukannya perubahan SSH.
5. Untuk pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik terdapat 3 sub kegiatan yang realisasinya berada dibawah target yaitu sub keg pengelolaan informasi publik dan layanan Hubmed dan sub kegiatan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Pada sub keg pengelolaan informasi public monev PPID pembantu tidak bisa dilaksanakan dikarenakan anggarannya mengalami refocusing sehingga akan dilaksanakan penyesuaian indikator pada perubahan anggaran. Pada subkeg layanan hubungan media beberapa rekening anggaran sudah habis terutama belanja langganan media cetak, belanja publikasi baliho spanduk yang sudah diusulkan penambahan anggaran pada Perubahan APBD 2024.
6. Terkait pelaksanaan program dan kegiatan bidang E-Gov, pada triwulan III sudah dilakukan pengembangan 2 Aplikasi baru yakni siResa (Sistim Informasi retribusi sampah) dan siCeking (sistim informasi cek kasus stunting). Sementara itu untuk penyusunan dokumen arsitektur SPBE dan masterplan Smartcity belum bisa dilakukan dikarenakan mengalami refocusing anggaran.
7. Mengakhiri rapat, Kepala Dinas mengarahkan masing-masing PPTK untuk menindaklanjuti pelaksanaan sub kegiatan terutama yang belum mencapai target dan memaksimalkan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan renja 2024.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Notulis,

Mengetahui :

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



Drs. AMPERA, SH., Si
19680101 199803 1 010

Perencana Ahli Muda
Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



VITRI YENNITA, SH
NIP. 198201717 200802 2 001

Foto Dokumentasi Rapat :

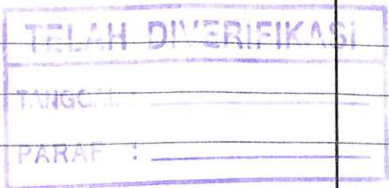


DAFTAR HADIR

Acara
Hari/ Tanggal
Tempat

: Rapat Evaluasi Kinerja bulan September
: Jumat, 4 Oktober 2024
: Dinas Kominfo Padang Panjang

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ampela Salim	L	Kadit	1
2	Ario P. Pratama	L	Rentan	2
3	Mangulir	L	Ikep	3
4	Rini Salmirawati	P	Bd. Ego & IT	4
5	Dina Kunaefi	P	Pakum AM	5
6	Hany Sulito	L	Ikep	6
7	IRANI SCAFRITA	P	Konbaj Umpeg	7
8	Yuli Kody	P	Ikep	8
9	NOFRILWO PUTRA	L	Egovt	9
10	Vitri Yennita	P	Sekretariat	10
11	Olga Fauzi Febuian	L	Sekretariat	11
12	Dila Prima Susanti	P	Staff	12
13	Rozzi	P	Staff	13
14	Teri Putra	L	Staff	14
15	Rizky Syahputra	L	Umpeg	15
16	Hanni April Reza	L	Staff	16
17	Eny Superti	P	Staff	17
18	Bah Sejiz	L	Staff	18
19	DERI	L	sekre	19
20	DENI SYAHPUTRA	L	Egov	20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30



Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang

ARIO DIAN PRATAMA, ST
NIP. 19820808 200902 1 001

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Januari 2025
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Pimpinan Rapat : Kadis Kominfo Kota Padang Panjang
Peserta : ASN di lingkungan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang
Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo Triwulan IV Tahun 2024

- Isi Rapat : 1. Rapat membahas tentang evaluasi kinerja Dinas Kominfo pada Bulan Desember sekaligus Triwulan IV Tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada akhir Desember 2024, untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dari target sebesar 100% baru terealisasi sebesar 99,63%% atau dengan persentase capaian kinerja fisik sebesar 99,63%. Sementara itu terkait dengan realisasi keuangan, dari Pagu anggaran sebesar Rp. 8.824.813.783,- dapat terealisasi sebesar Rp.8.311.789.072,- atau mencapai 94,19%.
3. Terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan hasil rapat evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Pada sasaran strategis Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas dengan Indikator Indeks domain layanan SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan target pada PK Perubahan sebesar 3,40 terealisasi dengan nilai 3,82 atau dengan capaian 112 %.
 - Nilai ini berasal dari laporan hasil evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada tanggal 1 Januari 2025. Secara Umum dari laporan tersebut dari aspek layanan SPBE, baik layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik maupun layanan public berbasis elektronik dapat terlaksana dengan baik dan tidak memiliki permasalahan yang cukup berarti. Namun barangkali dalam pelaksanaannya kadang terjadi kendala pada aksesibilitas/ kelancaran aplikasi pada server Kementerian/ Lembaga penyedia aplikasi itu sendiri. Sedangkan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah biasanya kendala aksesibilitas terjadi karena adanya serangan siber. Hal ini disebabkan karena keamanan jaringan kita belum memiliki pengamanan yang cukup. Sehingga kedepan perlu peningkatan sistem pengamanan jaringan internet pemerintah Kota padang Panjang
 - Sasaran Strategis kedua, Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan) dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan target indeks 2,80, diperoleh realisasi sebesar 1,94 atau

dengan capaian 69,29%.

- Berdasarkan paparan Kabid E Gov, rendahnya capaian pada indikator ini dikarenakan pada tahun 2024 pemerintah Kota Padang Panjang belum sepenuhnya menerapkan kaidah-kaidah statistic sectoral, sehingga selanjutnya perlu perbaikan berupa penyusunan pedoman penyelenggaraan statistic, evaluasi yang lebih inten terhadap penyelenggaraan statistic, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Statistik serta peningkatan koordinasi dengan stakeholder melalui forum satu data Kota padang Panjang
- 4. Terkait dengan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah yang diampu Sekretariat selama tahun 2024, realisasi fisik program dan kegiatan sesuai dengan target yakni 100%. Dalam hal ini target kinerja juga mengalami penyesuaian dengan adanya pergeseran anggaran guna refocusing di akhir bulan Desember. Namun secara keseluruhan untuk realisasi keuangan mencapai 96,57%.
- 5. Untuk pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik terdapat 1 sub kegiatan yang realisasinya berada dibawah target yaitu sub keg Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.432.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 106.477.000,- atau sebesar 24,62%. Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target 13 unit dan terealisasi sebanyak 12 (dua belas) unit.
- 6. Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini dikarenakan tidak terealisasinya belanja pengadaan mobil informasi dikarenakan waktu yang tersedia tidak cukup dan tidak memungkinkan penyedia menyediakan mobil sesuai dengan spek yang diminta. Untuk sub kegiatan ini baru muncul pada perubahan anggaran terkait dengan adanya reward Dana Insentif Fiskal terkait penganggulan inflasi daerah.
- 7. Mengakhiri rapat, Kepala Dinas mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang sesuai ataupun melebihi target, sementara untuk yang belum terlaksana Kadis mengarahkan masing-masing PPTK untuk melaksanakan evaluasi guna perbaikan di tahun 2025.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Notulis,

Mengetahui :

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



DIS/AMBERA SH. Si
19680101 199803 1 010

Perencana Ahli Muda
Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



VIIRI YENNIITA, SH
NIP. 198201717 200802 2 001

Foto Dokumentasi Rapat :



Daftar Absensi Rapat

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2024
 Hari/ Tanggal : Selasa, 7 Januari 2025
 Tempat : Dinas Kominfo Padang Panjang

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NOFALMO PUTRA	L	Prahum	1
2	Rini Sulmiwati	P	Bis. Gov II	2
3	Vini Yeani	P	Perencana	3
4	Ampera Galin	L	Kadus	4
5	Irmu Saputra	P		5
6	Olga Fauzi Fessrian	L	STAFF	6
7	Harry Sulisdo	V	IKP	7
8	Dona Hunaefi	P	Prahum m	8
9	Wangy	L	Wep	9
10	Fas Seta Rahma	L	Staf	10
11	ALIO DP	L	SEKRETARIS	11
12	Pardiono	L	IKP	12
13	Andes Mandani	V	IKP	13
14	Dani Apri Des	L	STAF	14
15	WANFRI	L	E Gov	15
16	Deni Xoldia		Sekre	16
17	TERI AIRA	L	Staf	17
18	Rozzi	P	Klug	18
19	Elvi Novantiy	P	Staf	19
20	Intari Muspita Sari	P	E Gov	20
21	PRISDIANZI	L	E gov	21
22	AFFISI PERGANA	L	Staf	22
23	DILA PS	P	E gov	23
24	WINDI	P	E Gov	24
25	BOBI SAGITA	L	IKP	25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Padang Panjang



PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN III TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	2,60	0	0	0		-	0%		
2	Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks pembangunan statistik	2,80	0	0	0		-	0%		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan III		Ket
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,327,672,331	3,428,432,448	79%	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,437,988,481	2,807,792,576	82%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3,437,988,481	2,807,792,576	82%	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14,000,000	14,000,000	100%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14,000,000	14,000,000	100%	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	298,534,550	201,662,013	68%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	8,136,500	4,012,000	49%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,998,100	22,526,500	64%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,999,950	2,853,600	29%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245,400,000	172,269,913	70%	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,233,300	19,500,000	57%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34,233,300	19,500,000	57%	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313,514,000	212,748,859	68%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109,530,000	78,724,019	72%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203,984,000	134,024,840	66%	

6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229,402,000	172,729,000	75%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177,164,000	137,661,000	78%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,908,000	26,658,000	99%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,330,000	8,410,000	33%	
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,650,177,850	1,194,977,242	72%	
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,650,177,850	1,194,977,242	72%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	331,805,000	224,473,304	68%	
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	182,232,600	100,358,088	55%	
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1,110,971,000	868,507,850	78%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	25,169,250	1,638,000	7%	
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,147,228,600	333,319,756	16%	
8	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,147,228,600	333,319,756	16%	
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270,573,600	67,187,749	25%	
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	1,876,655,000	1,125,858,516	60%	
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	30,020,000	1,039,500	3%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30,020,000	1,039,500	3%	
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	30,020,000	4,828,750	16%	
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	14,160,000	9,425,250	67%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14,160,000	9,425,250	67%	
10	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	14,160,000	9,425,250	67%	

Padang Panjang, 4 Oktober 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang



Drs. AMPERA, SH, M.Si
NIP.196801011998031010

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juli 2024 .
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Pimpinan Rapat : Kadis Kominfo Kota Padang Panjang
Peserta : ASN di lingkungan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang
Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo Bulan Juni
dan Triwulan II Tahun 2024.

- Isi Rapat : 1. Rapat membahas tentang evaluasi kinerja Dinas Kominfo pada Bulan Juni sekaligus Triwulan II Tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada akhir Juni, untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dari target sebesar 66% baru terealisasi sebesar 61% atau dengan persentase capaian kinerja fisik sebesar 92%. Sementara itu terkait dengan realisasi keuangan, dari target sebesar 59% dapat terealisasi sebesar 49,5 % atau dengan capaian kinerja sebesar 83 %.
3. Terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pada sasaran strategis Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas dengan Indikator Indeks domain layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan target sebesar 2,60 masih belum bisa diukur dikarenakan pengukuran ini terkait dengan jadwal evaluasi SPBE dari Menpan. Sesuai informasi untuk tahun ini penilaian akan dilakukan mulai bulan Juli. Pada Triwulan II kegiatan yang dilakukan lebih kepada perencanaan kegiatan, koordinasi TIM SPBE serta persiapan dokumen dan kelengkapan penilaian.
 - b. Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan) dengan Indikator

Indeks Pembangunan Statistik dengan target indeks 2,80, penilaian sudah dilakukan pada bulan Mei dan hasil evaluasi dijadwalkan akan diperoleh di bulan Agustus.

- c. untuk . Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan informasi publik dengan indikator Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan dengan target 67% sudah terealisasi 67 % atau capaian kinerja 100%. Dari 6 indikator yang ditargetkan 4 diantaranya sudah tersedia data dukungannya antara lain Ketersediaan SDM Pengelola (dibuktikan melalui SK Tim Pengelola), Laporan Tindak lanjut penyelesaian pengaduan, Laporan responsivitas penyelesaian pengaduan (Kecepatan tindak lanjut) dan Rating penilaian masyarakat. Sementara untuk indikator kualitas dan rencana aksi sudah disusun dengan SK kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang.
4. Sesuai dengan paparan Sekretaris, untuk realisasi sekretariat pada bulan Juni dan triwulan II hampir sesuai dengan target. Sub kegiatan yang tidak mencapai target terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana kantor dikarenakan realisasi pengadaan filling cabinet baru bisa dilakukan diperubahan anggaran setelah dilakukannya perubahan SSH.
5. Terkait pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik terdapat 2 sub kegiatan yang realisasinya berada dibawah target yaitu sub keg pengelolaan informasi public dan layanan Hubmed dan sub kegiatan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Pada sub keg pengelolaan informasi public monev PPID pembantu tidak bisa dilaksanakan dikarenakan anggarannya mengalami refocusing sementara untuk subkeg layanan hubungan media beberapa rekening anggaran sudah habis yakni terkait belanja baliho spanduk sementara masih ada kebutuhan untuk spanduk idul adha, HUTRI dan HJK, sementara itu untuk sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik terkait liputan untuk HJK terkendala kekurangan anggaran.
6. Terkait pelaksanaan program dan kegiatan bidang E-Gov, pada triwulan II sudah dilakukan pengembangan 1 Aplikasi baru terkait program pengelolaan pelayanan kebersihan dan proses penyusunan probis dan pembangunan sistem informasi pengelolaan dan pelaporan penanganan stunting sesuai renaksi RB tematik digitalisasi administrasi pemerintahan(penanganan stunting). Sementara itu, untuk penyusunan dokumen arsitektur SPBE dan masterplan Smartcity belum bisa dilakukan

dikarenakan mengalami refocusing anggaran.

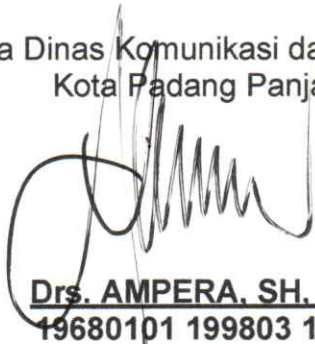
7. Terkait dengan IGA, sesuai dengan saran Bappeda, beberapa usulan inovasi dari kominfo agar dapat dikongkritkan guna meningkatkan nilai kematangan. Sementara untuk inovasi baru yang diusulkan agar segera diproses.
8. Mengakhiri rapat, Kepala Dinas mengarahkan masing-masing bidang supaya menyegerakan finalisasi penyusunan RKA perubahan 2024 dan memaksimalkan pencapaian indikator kinerja 2024 dengan anggaran yang masih tersedia.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :

Notulis,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang,



Drs. AMPERA, SH. M.Si
19680101 199803 1 010



OLGA FAUZI FEBRIAN, S.Kom
19960225 202321 1 011

Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Triwulan II

Kamis, 4 Juli 2025





NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 17 April 2024

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Pimpinan Rapat : Kadis Kominfo Kota Padang Panjang

Peserta : ASN di lingkungan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo Triwulan I Tahun 2023.

Isi Rapat : 1. Rapat membahas tentang evaluasi kinerja Dinas Kominfo pada Triwulan I Tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024.

2. Pada Tahun 2024, sesuai dengan Renstra Dinas Kominfo Kota Padang Panjang terdapat 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun ini Dinas Kominfo melaksanakan 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada akhir triwulan I, untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dari target sebesar 33% dapat terealisasi sebesar 28% atau dengan persentase capaian kinerja fisik sebesar 84%. Sementara itu etrkait dengan realisasi keuangan, dari target sebesar 30% dapat terealisasi sebesar 19% atau dengan capaian kinerja sebesar 63 %.

4. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan disebabkan adanya rekening yang tidak bisa dibayarkan terkait dengan insentif penulisan berita dikarenakan tidak termuat dalam SB pada sub kegiatan layanan hubungan media, selain itu terdapat belanja meubiler berupa filling cabinet yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan harga penyedia lebih dari harga yang tertampung dalam DPA. Sementara itu untuk sub kegiatan pengamanan informasi belum bisa dilaksanakan pelatihan dikarenakan menunggu kepastian jadwal dari Narasumber BSSN. Untuk sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, serta sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral rendahnya realisasi dikarenakan beberapa rekening belanja mengalami refocusing anggaran.

5. Terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pada sasaran strategis Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas dengan Indikator Indeks domain layanan SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan target sebesar 2,60 masih belum bisa diukur dikarenakan pengukuran ini terkait dengan jadwal evaluasi SPBE dari Menpan. Sesuai informasi untuk tahun ini penilaian akan dilakukan mulai bulan Juli. Pada Triwulan I kegiatan yang dilakukan lebih kepada perencanaan kegiatan, koordinasi TIM SPBE serta persiapan dokumen dan kelengkapan penilaian.
 - b. Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan) dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan target indeks 2,80, juga masih belum bisa diukur dikarenakan jadwal assesment dari BPS yang dijadwalkan pada bulan April sampai Mei dan hasil evaluasi akan dirilis pada bulan Agustus. Pada Triwulan I kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan kegiatan, koordinasi dengan forum data OPD dan a persiapan dokumen dan kelengkapan penilaian.
 - c. untuk Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan informasi publik dengan indikator Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan dengan target 67% sudah terealisasi 67 % atau capaian kinerja 100%. Dari 6 indikator yang ditargetkan 4 diantaranya sudah tersedia data dukungnya antara lain Ketersediaan SDM Pengelola (dibuktikan melalui SK Tim Pengelola), Laporan Tindak lanjut penyelesaian pengaduan, Laporan responsivitas penyelesaian pengaduan (Kecepatan tindak lanjut) dan Rating penilaian masyarakat. Sementara untuk indikator kualitas dan rencana aksi akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
6. Jadi secara keseluruhan, masih terdapat 2 pengukuran kinerja yang belum tersedia untuk triwulan I ini, namun proses untuk menyiapkan bahan dan kelengkapan pengukuran kinerja sudah dimulai oleh masing masing bidang dengan mempedomani hasil evaluasi dari tahun sebelumnya.

7. Selanjutnya berdasarkan berbagai kondisi di atas, Kadis mengarahkan untuk mengatasi rendahnya realisasi fisik dan keuangan yang disebabkan selain dari adanya refocussing anggaran, kepada masing-masing bidang tetap diminta agar meningkatkan kinerja dan mencari solusi untuk masing-masing permasalahan misalnya dengan mempersiapkan usulan perubahan SB untuk rekening belanja yang belum bisa direalisasikan, begitu juga dengan menghubungi BSSN untuk memastikan jadwal narasumber sehingga pelatihan dapat segera dilaksanakan. Untuk anggaran yang terkena refocussing tetap diharapkan agar bisa mencapai kinerja secara maksimal dengan melakukan inovasi dalam pelaksanaan sub kegiatan

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang



Drs. AMPERA, SH., Si
19680101 199803 1 010

Notulis,

Perencana Ahli Muda
Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



VITRI YENNITA, SH
NIP. 198201717 200802 2 001

FOTO RAPAT



DAFTAR ABSENSI

DAFTAR HADIR				
Acara		Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Maret dan Triwulan I		
Hari/ Tanggal		Rabu/ 17 April 2024		
Tempat		Dinas Komunikasi dan Informatika		
NO	NAMA	UP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Angga S.M.K	L	Kasir	
2	Andi Rini Pratama	L	Subdit	
3	Susi Janti	P	TM	
4	Viki Yanti	P	Perencana	
5	Rani	P	Staf	
6	Budiono	L	Staf	
7	Harry Salsika	L	PIP	
8	Irma Satriana	P	Kendang (Kendang)	
9	Andi Mardiana	L	Staf	
10	Andi Mardiana	L	Staf	
11	Nofriano Pratama	L	Perencana	
12	Dina Hidayati	P	Perencana	
13	Ivan Mulya Sari	P	Staf	
14	Dia Rahmatullah	L	Staf	
15	M. Nurul Huda	L	Staf	
16	Fauziah Rahma	L	Staf	
17	Winda Di Nugroho	P	Staf	
18	Reza Yuliana	P	Perencana Ahli Muda	
19	Yuli Adi	P	Perencana	
20	Emy Supriyati	P	Staf	
21	Tika Rika	L	Staf	
22	Muhammad	L	Staf Ahli Muda	
23	FAISAL HADI SETIATAMA	L	PRAGM	
24	Harini Atri Reza	L	Staf	
25	Dia Murni	P	Staf	
26	Dia Fauzi Fauzan	L	Staf	
27	Dina V. Rika	L	Perencana	
28	Rika Putriyati	L	Perencana	
29	Beti Satriyati	L	Staf	
30	Fedy Afaniza	L	Perencana	

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang

ABIO DIAN PRATAMA, ST
NIP. 19820808 200902 1 001